

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 493/PR.02/KR/05/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 -2029
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :	1.	Bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
	2.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
	3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

	5.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
	6.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tata Kerja;
	7.	Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
	8.	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.
KESATU		Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
KEDUA		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pinang
Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ZULHADRI PUTRA, S.T

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 493/PR.02/KR/05/2026
Tanggal : 10 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	Sesuai Tarhet RPJMN	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	1. Hasil BPS 2. Target Kinerja sesuai RPJMN	Bagian P3SH	Bagian P3SH
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Dilakukan oleh Pihak ke-3 2. Indeks kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017	Bagian P3SH	Bagian P3SH

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Pegawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pegawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi RB dari Kementerian PANRB	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Laporan Pencegahan, Data Pengawasan Partisipatif	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Data SIGAPLAPOR, Laporan Penanganan Pelanggaran	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Laporan Penyelesaian Sengketa, Data SIPS	Bagian P3SH	Bagian P3SH
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.	Jumlah Laporan Pengawasan Partisipatif, Dokumen Kebijakan, Laporan Program Kerja x 100%	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Data Pemantau Pemilu Terakreditasi, Berita Acara Verifikasi dan Akreditasi x 100%	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung		
		c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	Jumlah MoU/PKS, Laporan Pelaksanaan Kerja Sama, Dokumentasi Kegiatan x 100%	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang belitas	a. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	Jumlah Data Diklat, Sertifikat, LMS Bawaslu, Data Kepegawaian x 100%	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Laporan Kajian, Jurnal, Naskah Akademik, Publikasi x 100%	Bagian P3SH	Bagian P3SH
		c. Nilai Indeks Sistem Merit	Hasil Penilaian Sistem Merit KASN	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		d. Nilai Indeks BeraKAHLAK	Hasil Survei BerAKHLAK	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		e. Nilai Indeks Reformasi Hukum	Hasil Evaluasi Reformasi Hukum	Bagian P3SH	Bagian P3SH
		f. Opini BPK	LHP BPK atas LK Bawaslu	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	Hasil Penilaian BMN/KPKNL	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil Penilaian UKPBJ/LKPP	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	Hasil Evaluasi Bappenas	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
		j. Nilai SAKIP Bawaslu	LHE AKIP KemenPANRB	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		k. Nilai Capaian IKU	Laporan Kinerja (LKjIP) dan Aplikasi Kinerja	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	Laporan Monitoring RPJMN/RKP	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		m. Tingkat Manuritas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Hasil Penilaian SPIP BPKP	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	Hasil Survei LAPOR dan Rekap Aduan	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	Hasil SPI KPK	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		p. Persentase Tindak Rekomendasi temuan/laporan BPK	LHP BPK dan Monitoring TLRHP	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		q. Nilai Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi
		r. Predikat keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	Hasil Survei Citra, Monitoring Media, Publikasi	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

**KETUA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ZULHADRI PUTRA, S.T